



Strategi Peningkatan Kepatuhan Pembayaran PBB melalui Pembentukan Satgas di Kecamatan Tandes

Laluna Nandita Hapsari¹, Niniek Imaningsih^{2*}, Cholid Fadil³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Email: ¹22011010170@student.upnjatim.ac.id, ²niniekimaningsih@email.com,

³cholidfadil.ep@upnjatim.ac.id

Abstract

The internship conducted at UPTB 4 of the Regional Revenue Agency (BAPENDA) in Surabaya from September 23 to December 31, 2024, aimed to increase revenue from Property Tax (PBB) through the implementation of data verification and validation methods, as well as the establishment of task forces. This activity also provided students with an opportunity to deepen their understanding of local tax management and strategies to raise public awareness about tax obligations. During the verification stage, taxpayer data, such as names, addresses, and Property Identification Numbers (NOP), was cross-checked to ensure the accuracy of the recorded information. This process was designed to facilitate the smooth distribution of documents, including Property Tax Notification Letters (SPPT), to taxpayers. Additionally, the formation of task forces conducting direct visits to taxpayers served as an effective means of reminding the public about their tax payment obligations and enhancing compliance rates. The results of this internship showed improvements in the efficiency of tax administration, although some challenges, such as data discrepancies and absentee taxpayers, remain to be addressed. Overall, the internship provided significant benefits, both for students in honing their practical skills and for the agency through the introduction of innovative ideas to refine the tax management system.

Keywords: Internship UPTB 4 BAPENDA Surabaya, Land and Building Tax, Data Verification, Task Force, Tax Revenue.

Abstrak

Magang yang dilakukan di UPTB 4 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya pada periode 23 September hingga 31 Desember 2024 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui penerapan metode verifikasi dan validasi data serta pembentukan satgas. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang pengelolaan pajak daerah serta strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Pada tahap verifikasi, data wajib pajak, seperti nama, alamat, dan Nomor Objek Pajak (NOP), dicocokkan untuk memastikan keakuratan informasi yang terdaftar. Proses ini bertujuan untuk mendukung kelancaran distribusi dokumen, termasuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), kepada para wajib pajak. Selain itu, dengan pembentukan tim satgas yang bertugas melakukan kunjungan langsung ke lokasi wajib pajak, kegiatan ini menjadi sarana efektif untuk mengingatkan masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Hasil dari pelaksanaan magang ini menunjukkan adanya peningkatan dalam efisiensi administrasi pajak, meskipun beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian data dan ketidakhadiran wajib pajak, masih menjadi tantangan yang perlu ditangani. Secara keseluruhan, kegiatan magang memberikan manfaat signifikan, baik bagi mahasiswa dalam mengasah keterampilan praktis mereka, maupun bagi instansi melalui munculnya ide-ide baru yang dapat membantu menyempurnakan sistem pengelolaan pajak.

Kata Kunci: Magang, UPTB 4 BAPENDA Surabaya, Pajak Bumi dan Bangunan, Verifikasi Validasi, Satgas, Penerimaan Pajak.

A. PENDAHULUAN

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tandes masih rendah, sehingga menghambat peningkatan penerimaan daerah yang seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan. Rendahnya kepatuhan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti data wajib pajak yang kurang akurat, minimnya sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan, serta ketiadaan pengawasan yang efektif. Ketidakakuratan data sering menyebabkan kesalahan dalam proses penagihan, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Selain itu, kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak sepenuhnya memahami pentingnya membayar PBB dan manfaatnya bagi pembangunan daerah. Ketidadaan mekanisme pengawasan yang terorganisasi dan berkelanjutan juga memperburuk situasi tersebut.

Sebagai solusi dari permasalahan utama, maka diperlukannya pendekatan yang lebih fokus dan terintegrasi, salah satunya dengan melakukan validasi ulang data wajib pajak untuk memastikan keakuratan informasi, serta membentuk satuan tugas (satgas) khusus. Satgas ini berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan edukasi terkait kewajiban membayar pajak, dan memastikan proses pembayaran PBB berjalan dengan baik. Pembentukan satgas menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB di Kecamatan Tandes.

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, program magang MBKM di BAPENDA UPTB 4 Dukuh Kupang berlangsung dari tanggal 23 September 2024 hingga 31 Desember 2024. Magang ini diikuti oleh 33 peserta yang terdiri dari 17 mahasiswa UPN dan 16 mahasiswa UNAIR. Kegiatan magang ini difokuskan pada pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode utama yaitu Satgas. Satgas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke rumah atau tempat usaha wajib pajak untuk memberikan penjelasan mengenai cara yang tepat dalam melaporkan dan membayar pajak. Pendekatan ini juga memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk bertanya mengenai hal-hal yang mungkin belum dipahami atau dijelaskan sebelumnya.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan dan berkontribusi pada pengoptimalan pendapatan daerah Kota Surabaya.

Pemilihan wilayah Dukuh Kupang dilakukan karena daerah ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah melalui metode yang diterapkan. Pendekatan Satgas bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan mereka, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mendukung pembangunan kota secara keseluruhan.

Meningkatkan Kesadaran Pajak

Program magang di UPTB 4 BAPENDA Surabaya difokuskan pada upaya edukasi masyarakat mengenai pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah. Tujuan dari edukasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan mereka sekaligus menyoroti peran signifikan PBB dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satu pendekatan utama yang diterapkan adalah kunjungan langsung oleh satuan tugas (satgas) ke rumah atau tempat usaha wajib pajak. Dalam kunjungan ini, petugas memberikan penjelasan detail mengenai kewajiban perpajakan, tata cara pelaporan, hingga mekanisme pembayaran PBB secara benar. Hal ini memberikan masyarakat kemudahan untuk memahami sekaligus melaksanakan kewajiban mereka.

Di samping kunjungan satgas, pemerintah juga menggunakan undangan tagihan pajak sebagai pengingat bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB. Undangan ini berfungsi tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai media komunikasi yang efektif dalam menanamkan pemahaman akan pentingnya PBB. Dana yang dihimpun dari pembayaran pajak ini dimanfaatkan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, termasuk infrastruktur seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan sekolah, serta untuk meningkatkan layanan publik yang menunjang kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Metode yang diterapkan selama program ini melibatkan pendekatan personal yang memungkinkan interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak. Interaksi ini tidak hanya bertujuan mengingatkan kewajiban perpajakan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan penjelasan lebih mendalam mengenai manfaat dari pembayaran PBB. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan wajib pajak menyampaikan berbagai kendala atau pertanyaan yang mungkin mereka hadapi terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat dan pemerintah dapat terbangun, sekaligus meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Selain memberikan solusi jangka pendek, kegiatan magang ini juga bertujuan untuk menciptakan dampak jangka panjang dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Ketika masyarakat memahami bahwa kontribusi mereka melalui pembayaran PBB memberikan manfaat nyata, seperti perbaikan infrastruktur dan peningkatan layanan publik, mereka akan lebih terdorong untuk terlibat secara aktif. Hal ini tidak hanya meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.

Melalui kegiatan edukasi yang dilakukan selama program magang ini, masyarakat diajak untuk memahami bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah kontribusi penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Pendekatan ini membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap pajak, dari sekadar beban menjadi sebuah investasi kolektif untuk kemajuan bersama. Dengan demikian, masyarakat lebih sadar bahwa peran mereka dalam membayar pajak adalah elemen penting dalam menciptakan daerah yang maju dan sejahtera.

Validasi Data Pajak

Proses validasi data wajib pajak adalah langkah penting untuk memastikan keakuratan informasi yang digunakan dalam sistem perpajakan, terutama dalam pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Validasi ini melibatkan pengecekan berbagai data utama, seperti nama wajib pajak, alamat tempat tinggal atau usaha, serta Nomor Objek Pajak (NOP). Akurasi data ini sangat penting karena berdampak langsung pada kelancaran proses penagihan pajak dan efektivitas administrasi perpajakan.

Kesalahan pada data, seperti nama yang salah atau alamat yang tidak sesuai, dapat menyebabkan SPPT tidak sampai kepada wajib pajak yang bersangkutan. Akibatnya, pembayaran pajak dapat tertunda atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Selain itu, data yang tidak akurat juga dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap sistem perpajakan, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kepatuhan mereka. Oleh karena itu, validasi data menjadi langkah awal yang sangat diperlukan untuk menjaga transparansi dan kelancaran sistem perpajakan.

Selama pelaksanaan magang di BAPENDA UPTB 4 Surabaya, penulis turut berperan dalam proses validasi data wajib pajak. Selain melakukan pembaruan pada data yang tidak valid, penulis juga memberikan bantuan kepada wajib pajak yang menghadapi kendala teknis atau administratif. Beberapa kendala yang sering ditemukan meliputi

ketidaksesuaian data yang tercatat di sistem dengan data di lapangan, serta kesulitan wajib pajak dalam memahami prosedur pembayaran pajak, baik secara manual maupun digital. Dengan memberikan pendampingan langsung, penulis tidak hanya membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi wajib pajak, tetapi juga meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga keakuratan data.

Pendampingan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan mereka. Dengan memberikan penjelasan yang lebih personal dan terarah, penulis membantu masyarakat memahami manfaat pajak bagi pembangunan daerah, prosedur yang perlu diikuti, serta pentingnya kontribusi mereka dalam mendukung program pemerintah. Pendekatan ini juga memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah, karena wajib pajak merasa lebih didukung dan dihargai dalam menjalankan kewajibannya.

Validasi data yang dilakukan secara sistematis juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan daerah. Dengan memperbaiki data yang tidak valid, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan transparan kepada masyarakat. Hal ini menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang akuntabel dan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Selain memastikan kelancaran administrasi pajak, validasi data juga menjadi landasan bagi pengelolaan perpajakan yang lebih efisien. Data yang akurat memungkinkan pemerintah untuk mengelola penagihan, pelaporan, dan potensi peningkatan pendapatan daerah dengan lebih baik. Validasi ini juga memberikan peluang untuk mengidentifikasi objek pajak yang sebelumnya tidak tercatat atau kurang terkelola.

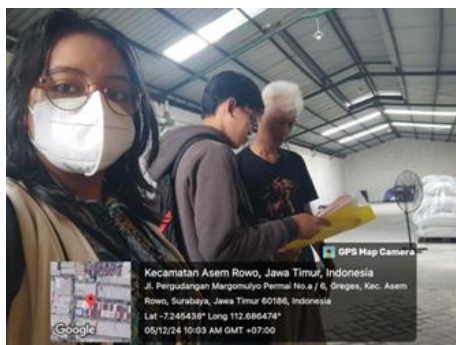
Secara keseluruhan, kegiatan validasi data selama program magang ini tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Melalui pendekatan ini, pemerintah dan mahasiswa magang berkolaborasi untuk mengatasi tantangan perpajakan, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, serta memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Validasi data menjadi elemen kunci dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama kegiatan magang di BAPENDA UPTB 4 Surabaya, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kunjungan yang

dilakukan oleh satgas memberikan dampak positif karena memungkinkan petugas untuk menjelaskan langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak dan cara yang benar untuk melaporkannya. Dengan pendekatan yang lebih personal, masyarakat tidak hanya diingatkan tentang kewajiban mereka, tetapi juga diberikan pemahaman tentang bagaimana pajak berkontribusi pada pembangunan daerah, seperti peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, validasi data wajib pajak yang dilakukan selama magang berperan penting dalam memastikan keakuratan informasi seperti nama, alamat, dan Nomor Objek Pajak (NOP). Validasi yang tepat membantu mencegah kesalahan dalam penagihan dan memastikan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang tepat sasaran. Penulis magang juga memberikan bantuan kepada wajib pajak yang menghadapi masalah administratif atau ketidaksesuaian data, yang tidak hanya memperlancar proses, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Pembentukan satuan tugas (satgas) yang mengedukasi dan mengawasi pelaksanaan pembayaran pajak terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat. Kunjungan langsung oleh satgas memungkinkan petugas untuk menjelaskan kewajiban pajak, menjawab pertanyaan, dan memastikan pembayaran dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Hal ini juga meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang terdaftar, yang sebelumnya menjadi hambatan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.



Gambar 1. Kegiatan satgas PBB di daerah Margomulyo, Kecamatan Tandes

satgas dan pendekatan langsung ini juga memperlancar hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat merasa lebih diperhatikan, yang meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan yang ada. Dengan komunikasi yang lebih terbuka, masalah pajak dapat diselesaikan dengan lebih mudah, sehingga masyarakat lebih kooperatif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Namun, dalam pelaksanaan program ini, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi keberhasilannya. Faktor pendorong utama adalah dukungan penuh dari pihak BAPENDA dan keterlibatan langsung satgas yang membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Selain itu, pendekatan edukasi yang bersifat personal meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, membuat masyarakat lebih memahami dan menerima kewajiban perpajakan mereka.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program ini. Salah satunya adalah ketidakakuratan data wajib pajak, yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam proses penagihan dan pengiriman tagihan. Ketidaktepatan data ini sering kali disebabkan oleh informasi yang belum terupdate atau adanya kesalahan dalam pencatatan yang membuat kewajiban pajak tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Hal ini memerlukan perhatian lebih untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem perpajakan adalah akurat dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak dan peranannya dalam mendukung pembangunan daerah juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Banyak masyarakat yang masih kurang paham tentang manfaat yang dapat diperoleh dari pajak yang mereka bayarkan, sehingga mereka tidak merasa terdorong untuk berpartisipasi dalam program perpajakan. Sebagian orang bahkan memandang pajak sebagai beban, bukan sebagai kontribusi untuk kemajuan bersama, yang menghasilkan persepsi negatif terhadap pajak itu sendiri. Hal ini sering kali terjadi karena kurangnya informasi yang jelas mengenai tujuan penggunaan pajak dan ketidakpercayaan terhadap cara pengelolaan pajak oleh pemerintah.

Di samping masalah data dan kesadaran, beberapa wajib pajak juga menghadapi kesulitan dalam aspek administratif, seperti masalah dalam proses pelaporan pajak atau ketidaksesuaian antara data objek pajak dan informasi yang tercatat dalam sistem. Misalnya, ada perbedaan antara luas tanah atau jenis bangunan yang tercatat dalam sistem dan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Perbedaan ini mengakibatkan adanya ketidaksesuaian data yang perlu segera diperbaiki. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya sistem yang lebih efisien serta dukungan yang lebih intensif dari petugas pajak agar wajib pajak dapat mengatasi kendala yang mereka hadapi.

Untuk mengurangi penghambat-penghambat tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh, mulai dari pembaruan sistem

data, peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak, hingga penyederhanaan proses administratif dalam perpajakan. Dengan cara ini, diharapkan berbagai tantangan yang ada dapat diminimalkan dan pelaksanaan program perpajakan dapat lebih optimal. Hasil dari pelaksanaan program ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pembayaran PBB setelah dilakukan program edukasi dan validasi data wajib pajak. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam program perpajakan juga mengalami kenaikan yang signifikan.

Edukasi yang diberikan secara langsung kepada masyarakat telah membantu mereka memahami pentingnya kewajiban membayar pajak dan prosedur yang benar dalam melaksanakan pembayaran. Validasi data wajib pajak juga berperan dalam memperbaharui dan memastikan ketepatan data yang digunakan dalam proses penagihan pajak. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih yakin bahwa data pajak mereka tercatat dengan benar dan transparan.

Selain itu, masyarakat kini tidak hanya sebagai peserta pasif dalam pembayaran pajak, tetapi mereka juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan terkait pajak, seperti berkonsultasi dengan petugas pajak dan mengikuti program edukasi yang diadakan oleh pemerintah daerah. Peningkatan kepatuhan dan kepercayaan ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah dalam mengedukasi dan memfasilitasi masyarakat agar lebih memahami peran pajak dalam mendukung pembangunan daerah. Diharapkan, hal ini akan semakin mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Pada gambar di atas menunjukkan persentase kontribusi mahasiswa magang dalam ikut merealisasikan pendapatan selama bulan September hingga Desember dengan menghasilkan peningkatan sebesar total 33,41%.

Angka peningkatan sebesar 33,41% yang ditunjukkan pada gambar merupakan hasil nyata dari kontribusi mahasiswa magang dalam mendukung realisasi pendapatan daerah selama periode September hingga Desember. Capaian ini mencerminkan efektivitas peran mahasiswa dalam membantu pelaksanaan berbagai program strategis yang difokuskan pada optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerja BAPENDA UPTB 4 Surabaya.

Selama pelaksanaan magang, mahasiswa tidak hanya terlibat dalam tugas-tugas administratif, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang lebih strategis, seperti validasi data wajib pajak, pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), serta edukasi kepada masyarakat. Validasi data yang dilakukan memastikan akurasi informasi wajib pajak, seperti nama, alamat, dan Nomor Objek Pajak (NOP), yang berkontribusi dalam mengurangi kesalahan administrasi yang dapat menghambat proses pembayaran pajak. Dengan data yang lebih valid, proses penagihan menjadi lebih lancar, meningkatkan jumlah penerimaan pajak secara keseluruhan.

Selain itu, kegiatan kunjungan langsung ke rumah atau tempat usaha wajib pajak bersama tim satgas menjadi salah satu pendekatan yang sangat efektif. Kunjungan ini tidak hanya bertujuan untuk mengingatkan masyarakat akan kewajiban membayar pajak, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa magang untuk memberikan penjelasan yang lebih personal mengenai manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan daerah. Pendekatan ini membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat, seperti kesalahan data atau kebingungan dalam proses pembayaran, sehingga meningkatkan tingkat partisipasi wajib pajak secara signifikan.

Peningkatan persentase kontribusi ini juga didukung oleh komunikasi yang efektif antara mahasiswa magang, pihak BAPENDA, dan masyarakat sebagai wajib pajak. Pendekatan yang bersifat langsung dan berbasis edukasi memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami pentingnya pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah. Selain itu, mahasiswa magang juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan melalui pelayanan yang informatif dan solutif.

Uraian	Target	Realisasi di Agustus	Realisasi di 15 Des	% Realisasi
+ Pajak Hotel (PBBT)	405.404.854.687	259.857.452.475	371.513.399.204	91,62%
+ Pajak Restoran (PBBT)	605.433.098.321	438.738.581.831	606.968.038.038	101,07%
+ Pajak Hiburan (PBBT)	84.327.667.778	54.334.142.521	82.504.110.704	97,84%
+ Pajak Reklame	181.940.557.833	90.721.380.150	135.867.426.350	74,70%
+ Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	658.368.512.544	439.723.097.655	685.332.390.477	104,10%
+ Pajak Parkir (PBBT)	57.776.568.085	36.776.014.322	54.833.863.182	94,92%
+ Pajak Air Tanah	1.368.359.434	917.643.840	1.375.988.700	100,57%
+ PDB/PT	1.644.686.688.272	1.275.976.259.895	1.387.408.844.700	84,42%
+ BPH/PT	1.488.778.543.833	900.822.845.021	1.248.033.888.940	83,84%
Jumlah Pajak Daerah	5.788.383.486.287	3.497.787.347.729	4.626.398.582.838	33,41%

Gambar 2. Peran mahasiswa saat magang dalam realisasi pendapatan

D. PENUTUP

Simpulan

Program magang di BAPENDA UPTB 4 Surabaya memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Melalui pendekatan satuan tugas (satgas) yang melibatkan kunjungan langsung ke rumah atau tempat usaha wajib pajak, masyarakat memperoleh edukasi yang mendalam tentang pentingnya pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tetapi juga memungkinkan dialog interaktif untuk menjawab kendala atau pertanyaan seputar kewajiban perpajakan. Validasi data yang dilakukan secara sistematis membantu memperbaiki akurasi informasi, mengurangi kesalahan administrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dukungan penuh dari BAPENDA, pendekatan personal dalam edukasi, serta keterlibatan aktif mahasiswa menjadi faktor pendukung utama keberhasilan program ini. Namun, beberapa tantangan dihadapi, seperti ketidakakuratan data wajib pajak, kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pajak, serta kendala administratif dalam pelaporan dan pembayaran. Persepsi negatif terhadap pajak juga menjadi hambatan yang perlu diatasi. Kendati demikian, program ini berhasil meningkatkan penerimaan pajak hingga 33,41% selama periode magang, menunjukkan efektivitas kolaborasi antara mahasiswa, BAPENDA, dan masyarakat dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas program, disarankan agar BAPENDA secara berkala melakukan validasi dan pembaruan data wajib pajak dengan memanfaatkan sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Hal ini akan memastikan keakuratan data, mencegah kesalahan dalam penagihan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Selain itu, penting untuk memperluas edukasi mengenai pajak dengan memanfaatkan media digital seperti media sosial, situs web resmi, dan aplikasi perpajakan. Hal ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi.

Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak juga perlu ditingkatkan, salah satunya dengan membentuk tim pengawasan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Penggunaan teknologi seperti pengingat otomatis untuk jatuh tempo pembayaran dapat menjadi solusi yang efektif. Mengingat kontribusi mahasiswa magang yang signifikan

dalam mendukung penerimaan pajak, keterlibatan mereka dalam program strategis, seperti edukasi dan pendampingan administrasi, sebaiknya dilanjutkan agar meningkatkan efektivitas kegiatan dan memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa. Edukasi tentang pajak perlu menonjolkan manfaat nyata dari pajak, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik, sehingga dapat mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap kewajiban pajak. Selain itu, keberlanjutan program ini dapat dijaga dengan menjadwalkan pelaksanaan rutin dan melakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan peluang perbaikan. Pengembangan sistem pembayaran pajak online yang mudah digunakan juga diperlukan untuk mengatasi kendala administratif, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami dan melaksanakan kewajibannya secara mandiri. Dengan langkah-langkah ini, program optimalisasi penerimaan pajak di BAPENDA UPTB 4 Surabaya diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah.

Saran disusun berdasarkan analisis keunggulan dan kelemahan atau hal yang sudah dan belum tercapai dari kegiatan serta keberlanjutan kegiatan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, J., & Puspitasari, R. (2023). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Zabags International Journal Of Economy*, 1(1), 7–10. <https://doi.org/10.61233/zijec.v1i1.65>
- Audi Fazhillah, & Nurlaila Nurlaila. (2024). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kecamatan Kotarih. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 22–35. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i2.1694>
- Badan Pendapatan Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kab Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Muhammad Fadli Asri, F., Jaelani Aris, A., Muhamad, S., Syarief Saiful, M., Kunci, K., Bapenda, F., Daerah, O., & Selatan, S. (2021). Artikel info Artikel history. 9(1), 28–40. <https://uit.e-journal.id/JPetium>
- Citra Pertiwi, L., & Asim Asy, M. (2024). Magang Kemenkeu Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa. In *Jurnal Pengabdian Indonesia JPI* (Vol. 2, Issue 1). <https://journal.institercom-edu.org/index.php/JPI>

- Devi Fujianti, Ane Sachintania, & Gunardi. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(2), 561–572. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v5i2.747>
- Dinamika, J., Pembangunan, E., & Nasir, M. S. (2019). ANALISIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH SETELAH SATU DEKADEOTONOMI DAERAH. In *JDEP (Vol. 2, Issue 1)*. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
- Hafid Nurrahman, F., Aurida, M., Saiful Anam, M., Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, U., & Indonesia, J. (2024). PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PROGRAM KERJA BUNGA DESA DI BADAN PENDAPATAN (BAPENDA) KABUPATEN BANYUWANGI LAND AND BUILDING TAX SERVICES IN THE VILLAGE INTEREST WORK PROGRAM IN THE REVENUE AGENCY (BAPENDA) OF BANYUWANGI DISTRICT. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Indriyasaki, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner*, 6(1), 860–871. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668>
- Melati, I., Adelyah, E., Agustina, M., Yunita, S., & Yosiana, S. (2024). PELAKSANAAN PROGAM MBKM MAGANG PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG. In *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier (Vol. 8, Issue 1)*.
- Nur Safitri, C., & Arafat Yusmad, M. (2024). IDEAS Journal of Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature Analysis of the Policy Discourse of the Regional Revenue Agency (Bapenda) in Determining the Valuation of Land Sales and Purchases in Palopo City. 12(2), 2984–2990. <https://doi.org/10.2456/ideas>
- Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso, E., Ladjeba, M., Akuntansi, J., Ekonomi Dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Bahu, J. (2022). Evaluation Of Rural and Urban Land and Building Tax Revenues in Increasing Poso Regency's Original Regional Income (Vol. 5, Issue 2).
- Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 455–466. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1425>
- Reza, D., Khuluk, K., Muljaningsih, S., & Asmara, K. (2021). ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR WILAYAH DI DAERAH PENYANGGA SURABAYA. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan (Vol. 7, Issue 1)*.
- Setiawan, A. E., Fatmawati, L., & Fikri, S. (n.d.). IBLAM LAW REVIEW. <https://doi.org/10.52249>
- Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). APAKAH PENGETAHUAN PAJAK DAN TINGKAT PENDIDIKAN MENINGKATKAN KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25>
- Tanjung, M. H. A. A., Harahap, N. B., Siboro, M. E., & Harahap, M. (2023). Program Magang Keahlian sebagai Sarana Praktik dan Peningkatan Kompetensi Mahasiswa di Bidang Penerbitan. *Indonesian Journal of Community Services*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.30659/ijocs.5.1.1-11>